



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR



RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023 Kabupaten Karanganyar

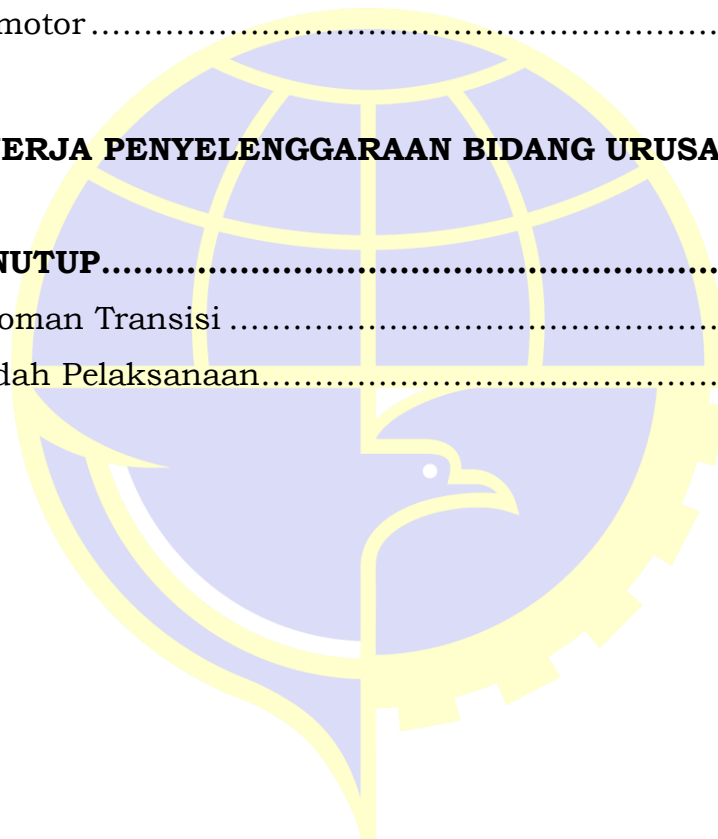
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Nyi Ageng Karang Karanganyar Telp. (0271) 495141, 495925 Fax 494705
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : dishub@karanganyarkab.go.id Kode pos 57711

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1-1
A. Latar Belakang	1-1
B. Landasan Hukum	1-2
C. Maksud dan Tujuan.....	1-6
D. Sistematika Penulisan.....	1-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR	II-1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2-1
B. Sumber Daya.....	2-7
C. Kinerja Pelayanan	2-11
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	2-17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN	III-1
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ..	3-1
B. Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati/ Wakil Bupati Karanganyar.....	3-2
C. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	3-10
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	3-19
E. Penentuan Isu-isu Strategis.....	3-24
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN	4-1
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	5-1
A. Strategi	5-1
B. Kebijakan.....	5-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	IV-1
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6-1

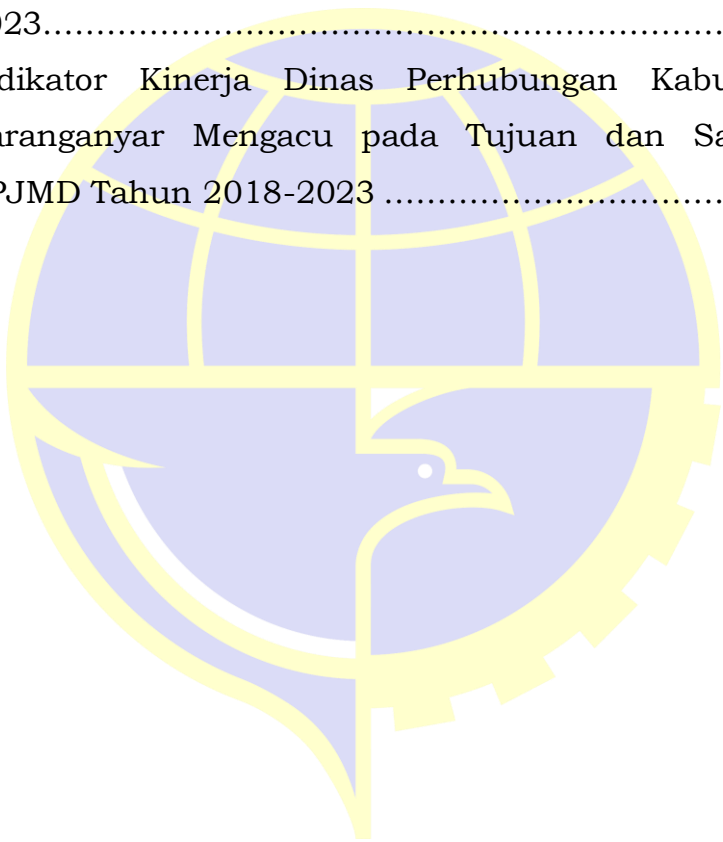
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.....	6-1
C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6-1
D.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6-1
E.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.....	6-2
F.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.....	6-2
G.	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan.....	6-3
H.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.....	6-3
I.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	6-3
BABVII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	7-1
BABVIII	PENUTUP.....	8-1
A.	Pedoman Transisi	8-1
B.	Kaidah Pelaksanaan.....	8-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020.....	II-7
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2020.....	II-7
Tabel 2.3.	Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar	II-8
Tabel 2.4.	Kondisi Terminal Tipe C di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.....	II-11
Tabel 2.5.	Data Rambu-rambu Lalu lintas Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019	II-12
Tabel 2.6.	Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Diuji, Trayek dan Kecelakaan Yang terjadi di Tahun 2015-2019	II-12
Tabel 2.7.	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019	II-13
Tabel 2.8.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018	II-14
Tabel 2.9.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Tahun 2019.....	II-14
Tabel 2.10.	Pencapaian Target dan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Tahun 2017-2019	II-15
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-2
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati Karanganyar dan Wakil Bupati Karanganyar.....	III-8
Tabel 3.3.	Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dinas Perhubungan dalam Pencapaian Sasaran Kementerian Perhubungan	III-11
Tabel 3.4.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan.....	III-17

Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan.....	III-23
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar	IV-1
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar	V-2
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.....	VI-5
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023	VII-2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 1-2

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Karanganyar II-2



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

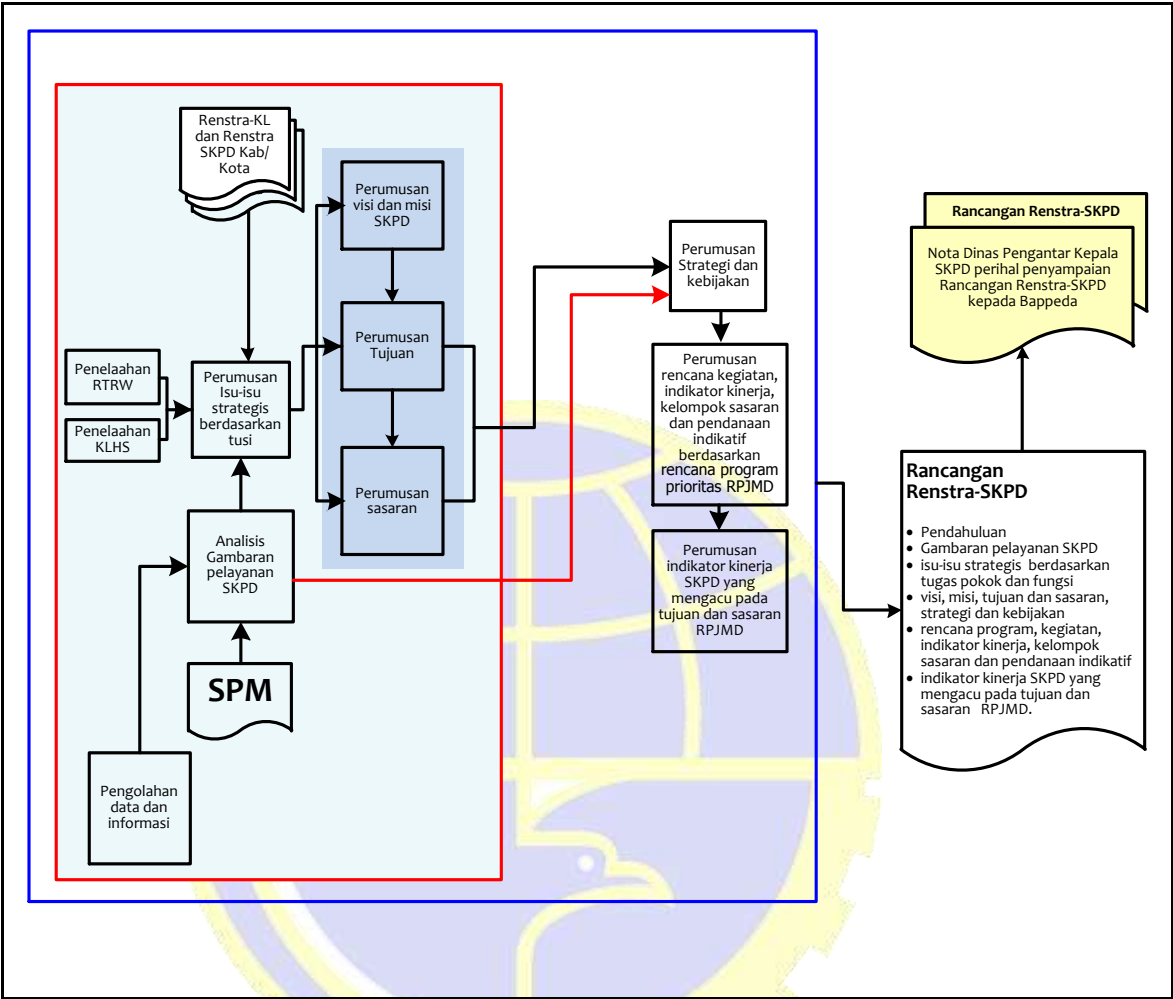
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) Penetapan Renstra.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Renstra Dinas Perhubungan mengalami perubahan seiring dengan perubahan susunan perangkat daerah pada Kabupaten Karanganyar. Perubahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar; RPJMD Kabupaten Karanganyar, dan memperhatikan Renstra Kementerian Perhubungan;
2. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar mengacu pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator Dan Pengawas Pada Dinas Daerah;
3. Penyusunan Renstra mengacu pada Renstra Kementrian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Karanganyar.

Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam bagian alir sebagai berikut:



Gambar 1.1

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
 28. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.
 29. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator Dan Pengawas Pada Dinas Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan sebagai penjabaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam mendukung visi dan misi bupati;

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar;

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar

Bab ini memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wikayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Karanganyar dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

BAB V Strategi dan Kebijakan

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

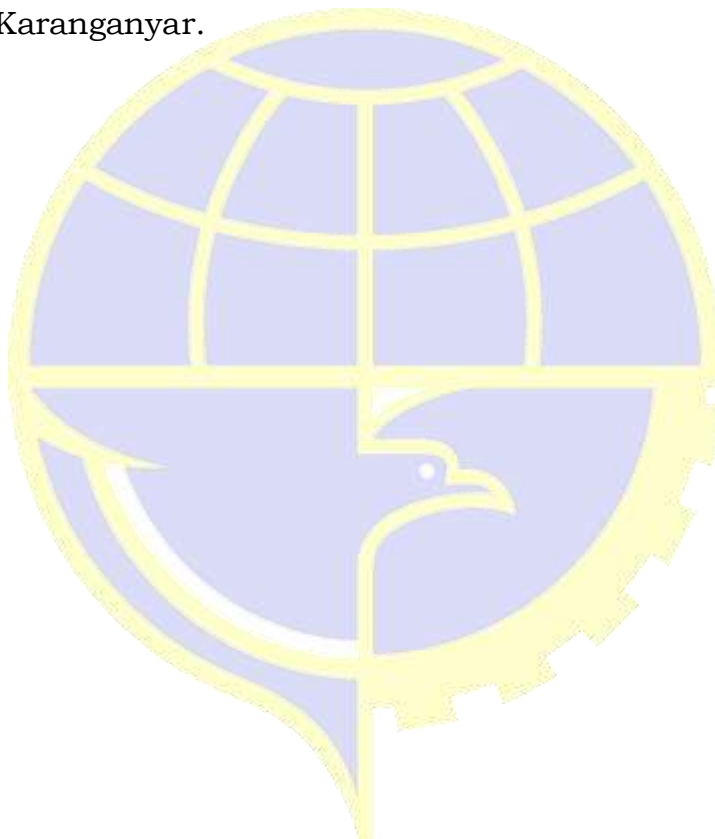
Bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar.

BAB VIII Penutup

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

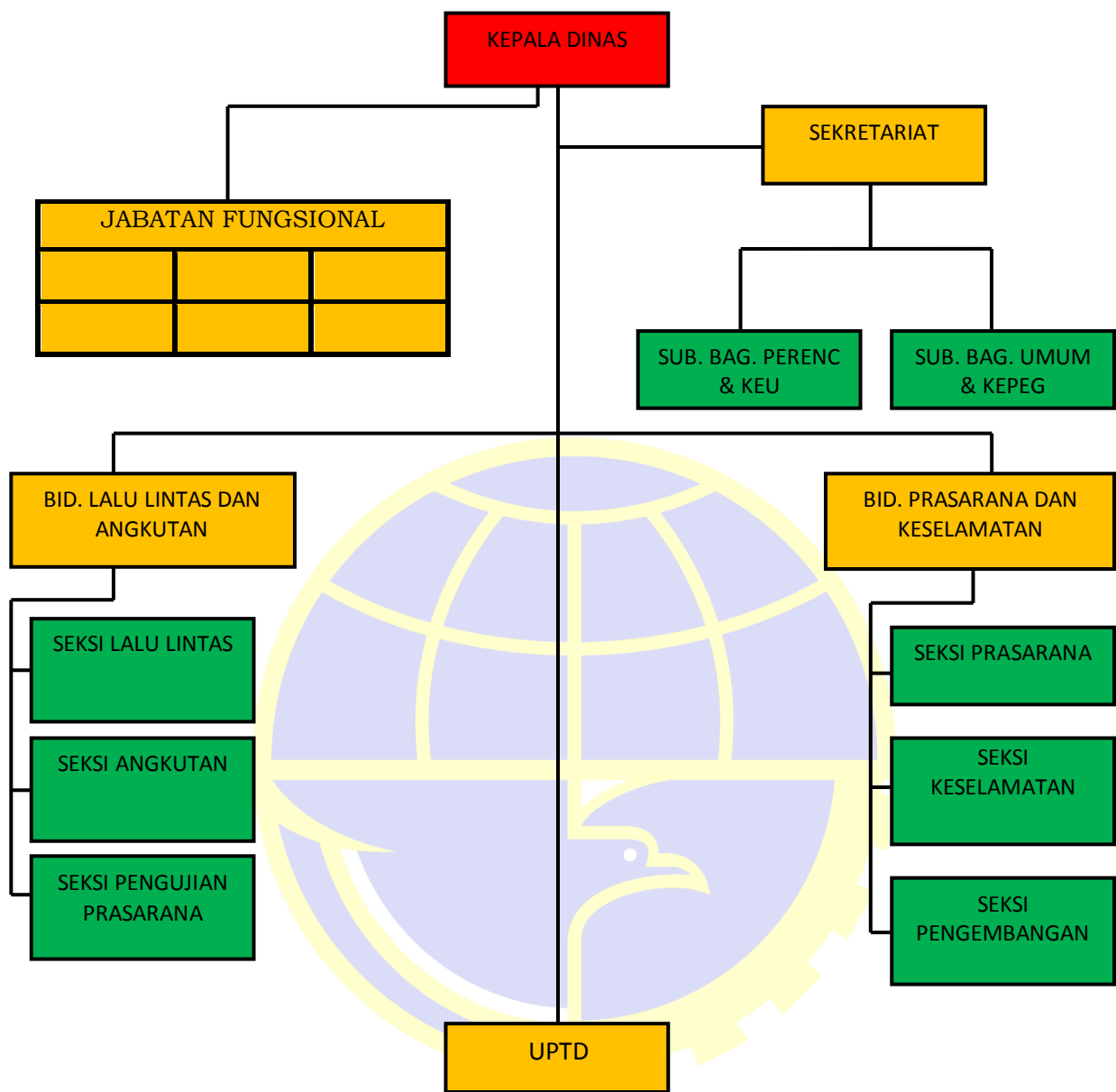
1. Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahkan :
 - 1) Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahkan :
 - 1) Seksi Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Angkutan;
 - 3) Seksi Pengujian Sarana.
- d. Bidang Prasarana dan Keselamatan membawahkan :
 - 1) Seksi Prasarana;
 - 2) Seksi Keselamatan;
 - 3) Seksi Pengembangan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar

2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2019 Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan serta kesekretariatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di perhubungan serta kesekretariatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan serta kesekretariatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1) Perumuskan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- 2) Pelaksana kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- 3) Pelaksana evaluasi dan pelaporan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris Dinas Perhubungan bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Dinas Perhubungan.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) pengkoordinasian kegiatan;
- 2) pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian;
- 4) pengkoordinasian tata laksana;
- 5) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- 6) pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas:

- 1) menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Rencana Strategis;
- 2) menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan sejenisnya;
- 3) menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan dan pertanggung jawaban;
- 4) melaksanakan teknis pengelolaan keuangan, perbendaharaan, anggaran dan pertanggung jawaban keuangan;
- 5) melakukan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggung jawaban

- 6) melaksanakan sistem pengendalian intern Pemerintah;
- 7) melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban;
- 8) menyiapkan bahan penyusunan informasi dan kehumasan; dan
- 9) melaksanakan pengelolaan administrasi barang.

d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan pengelolaan tata usaha surat-menyurat;
- 2) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- 3) Melaksanakan pengelolaan kerumahtanggan; dan
- 4) Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan hubungan masyarakat.

e. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Kepala Bidang Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.

f. Kepala Seksi Lalu Lintas

Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan;
- 2) Melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan;
- 3) Melaksanakan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan;
- 4) Menyiapkan bahan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas jalan; dan
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas.

g. Kepala Seksi Angkutan

Kepala Seksi Angkutan mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penyediaan angkutan umum untuk angkutan umum dan orang;
- 2) Menyiapkan bahan penetapan pelayanan angkutan perkotaan;
- 3) Menyiapkan bahan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan;

- 4) Menyiapkan bahan penerbitan izin trayek, penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu;
- 5) Menyiapkan bahan penetapan tarif kelas ekonomi; dan
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang angkutan jalan.

h. Kepala Seksi Pengujian Sarana

Kepala Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang pengujian kendaraan bermotor;
- 2) Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor; dan
- 3) Menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pengujian kendaraan bermotor.

i. Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan

Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan bertugas merumuskan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan.

j. Kepala Seksi Prasarana

Kepala Seksi Prasarana mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan terminal dan parkir;
- 2) Melaksanakan pengelolaan terminal tipe C;
- 3) Melaksanakan pengelolaan parkir; dan
- 4) Menyiapkan bahan penerbitan izin penyelenggaraan dan pengembangan fasilitas parkir.

k. Kepala Seksi Keselamatan

Kepala Seksi Keselamatan mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan, laik fungsi keselamatan sarana dan prasarana;
- 2) Memfasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan;
- 3) Memfasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan perusahaan angkutan umum dan kelaikan kendaraan; dan
- 4) Melaksanakan penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

1. Kepala Seksi Pengembangan

Kepala Seksi Pengembangan mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pemaduan moda;
- 2) Melaksanakan pengembangan teknologi perhubungan;dan Melaksanakan pengembangan lingkungan perhubungan.

B. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/ lembaga tersebut. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar memiliki data personil PNS sebanyak 51 orang dan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar memiliki sumber daya manusia sebanyak 91 orang, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	S2/ Magister	5	1	0	0	6
2	S1/ Sarjana	8	9	20	6	43
3	Diploma3	2	5	6	7	20
4	Diploma 2	4	0	1	0	5
5	Diploma 1	0	0	2	1	3
6	SMA/ Sederajat	23	2	36	4	65
7	SMP/ Sederajat	4	0	7	0	11
8	SD	5	0	1	0	6
	Jumlah Total	51	17	73	18	159

Sumber : Dishub Kabupaten Karanganyar, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 3,77 % (6 orang); berpendidikan S1 sebesar 27,04 % (43 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 40,88 % (65 orang).

Berdasarkan golongan pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar didominasi oleh Golongan II sebanyak 41 orang, Golongan III sebanyak 32 orang dan golongan IV sebanyak

6 orang. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2020

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan IV	4	1	5
2	Golongan III	18	11	29
3	Golongan II	20	5	25
4	Golongan I	9	0	9
5	Non Golongan	73	18	91
	Jumlah	124	35	159

Sumber : Dishub Kabupaten Karanganyar, 2020

2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat urgen untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar keadaan bulan Desember 2020 dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
A	Barang Tak Bergerak				
1	Tanah/Bangunan Terminal/kantor/lapangan	Bidang	19	0	19
2	Gedung Kantor Permanen	Unit	18	0	18
3	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Unit	6	0	6
4	Tempat Ibadah Permanen	Unit	3	0	3
5	Ged.Pertokoan/Kop/Ps	Unit	4	0	4
6	Bangunan Ged. Pertokoan Lainnya	Unit	1	0	1
7	Ged. Pos Jaga	Unit	3	0	3
8	Ged Grs/Pool Sp	Unit	3	0	3
9	Halte Bus	Unit	2	0	2
10	Ged.Terminal	Unit	10	0	10
11	Bang.Ged.Terminal	Unit	21	0	21
12	Bang.Pengujian Kelaikan Lain	Unit	1	0	1
13	Ged.tmp.kerja lainnya	Unit	2	0	2
14	Sarana dan Prasarana LLAJ				
	• Traffic light	Unit	6	0	6
	• Lampu flashing	Unit	47	0	47

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
	• Rambu	Unit	10	0	10
	• Traffic Cone	Unit	25	0	25
	• RPPJ	Unit	6	0	6
B	Barang Bergerak				
1	Alat-alat Angkutan				
	• Station wagon / pick up/ lainnya	Unit	2	0	2
	• Sepeda Motor	Unit	14	0	14
2	Alat angkut non motor			0	
	• Gerobag Dorong	Unit	17	0	17
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga				
	• Mesin Tik Man (11-13)	Unit	7	0	7
	• Mesin Tik Man Long (18)	Unit	3	0	3
	• Almari Besi/Metal	Buah	12	0	12
	• Rak kayu	Buah	2	0	2
	• Filing Besi /Metal	Buah	14	0	14
	• Buffet	Buah	2	0	2
	• Papan pengumuman	Buah	12	0	12
	• Papan tulis/white board	Buah	2	0	2
	• Peta	Buah	1	0	1
	• Display	Buah	1	0	1
	• Lemari Kayu	Buah	5	0	5
	• Rak kayu	Buah	3	0	3
	• Meja Kayu/Rotan	Buah	20	0	20
	• Kursi Besi /metal	Buah	31	0	31
	• Meja tulis	Buah	27	0	27
	• Meja Panjang	Buah	5	0	5
	• Meja Bundar	Buah	1	0	1
	• Kursi Tamu	Buah	7	0	7
	• Kursi Putar	Buah	4	0	4
	• Kursi biasa	Buah	50	0	50
	• Bangku tunggu	Buah	1	0	1
	• Kursi lipat	Buah	50	0	50
	• Meja Komputer	Buah	13	0	13
	• Meja ½ Biro	Buah	50	0	50
	• Sofa	Unit	1	0	1
	• Mebelair lainnya	Unit	4	0	4
	• Lampu Lalu lintas	Unit	1	0	1
	• Alat pembersih lainnya	Buah	1	0	1
	• Lemari Es	Buah	2	0	2
	• AC Unit	Buah	12	0	12
	• Kipas Angin	Buah	23	0	23
	• Televisi	Buah	4	0	4
	• Cassete Recorder	Buah	1	0	1
	• Amplifier	Buah	3	0	3

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
	• Loudspeaker	Buah	2	0	2
	• Wireless	Buah	1	0	1
	• Megaphone	Buah	2	0	2
	• Microphone	Buah	12	0	12
	• Unit Power Supply	Unit	20	0	20
	• Camera Film	Buah	6	0	6
	• Handy cam	Buah	4	0	4
	• Komputer unit/jaringan lainnya	Unit	4	0	4
	• PC	Unit	27	0	27
	• Laptop	Buah	12	0	12
	• Notebook	Buah	7	0	7
	• Harddisk	Buah	5	0	5
	• Printer	Buah	20	0	20
	• CPU	Buah	1	0	1
	• Monitor	Buah	3	0	3
	• Meja Kerja Pejabat Eselon III + II	Buah	10	0	10
	• Mobile File	Buah	4	0	4
	• Pesawat telepon PABX	Unit	1	0	1
	• Faximile	Unit	1	0	1
	• Generating set portable	Unit	3	0	3
	• Pompa Air	Unit	3	0	3
	• Alat Pengukur kegelapan kaca	Unit	2	0	2
	• Alat Ukur Universal (GPS)	Unit	6	0	6
	• Alat pengukur garis tengah	Unit	1	0	1
	• Alat ukur ban	Unit	2	0	2
	• Alat ukur lainnya	Unit	1	0	1
	• Alat penghancur kertas	Unit	1	0	1
	• Over head Proyektor	Unit	2	0	2
	• Pengukur dimensi	Unit	1	0	1
	• Alat pengukur angka dan kotak segel	Unit	1	0	1
	• Alat penunjuk arah	Unit	2	0	2
	• Meja Panjang	Buah	5	0	5
	• Meja Pelayanan Perijinan	Buah	1	0	1
	• Kursi Rapat	Buah	120	0	120
	• Chain Saw	Unit	2	0	2
	• Mesin Penghisap Debu	Unit	1	0	1
	• Mesin pemotong rumput	Unit	11	0	11
	• Dipenser	Unit	3	0	3
	• Handycam	Unit	3	0	3
	• Alat pemadam Portable	Buah	12	0	12
	• Suku cadang perangkat computer	Unit	1	0	1
	• Personal komputer lainnya	Unit	5	0	5

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
	• Tablet	Unit	3	0	3
	• Scanner	Unit	1	0	1
	• Managable swich	Unit	1	0	1
	• Camera attachment	Unit	6	0	6
	• Amplifier horn	Unit	1	0	1
	• Power amplifier	Unit	2	0	2
	• Talkshow desk	Unit	1	0	1
	• Build up prosesor	Unit	1	0	1
	• Mixer	Unit	1	0	1
	• Peredam ruangan	Unit	1	0	1
	• Off air monitor	Unit	2	0	2
	• Video monitor cctv	Unit	1	0	1
	• Power suplly	Unit	1	0	1
	• Tripot camera	Unit	2	0	2
	• Lensa camera	Unit	2	0	2
	• Sound system	Unit	2	0	2
	• Tape recorder	Unit	2	0	2
	• Handy Talky	Unit	15	0	15
	• Intercome	Unit	1	0	1
	• Unit Pemancar VHf/FM	Unit	3	0	3
	• Switches/menara antena/ Spanner	Unit	2	0	2
	• Memory camera foto	Unit	2	0	2
	• Memory video	Unit	1	0	1
	• Batery handycam	Buah	1	0	1
	• Ac Floor Standing	Unit	1	0	1
	Jumlah		941	0	941

Sumber : Dishub Kab. Karanganyar, 2020

C. Kinerja Pelayanan

Pelayanan urusan perhubungan di Kabupaten Karanganyar berupa perhubungan darat, yang meliputi: angkutan darat dan angkutan kereta api. Untuk angkutan darat di Kabupaten Karanganyar berupa terminal tipe B ada 2 buah (Tawangmangu dan Tegalgede), terminal tipe C ada 10 buah (Gondangrejo, Palur, Jungke, Matesih, Karangpandan, Ngargoyoso, Jambangan, Jenawi, Jumapolo dan Jatipuro).

Tabel 2.4
Kondisi Terminal Tipe C di Kabupaten Karanganyar Tahun 2019

No	Terminal	Lokasi	Kondisi
1	Terminal Gondangrejo	Gondangrejo	Kurang Baik
2	Terminal Palur	Palur	Kurang Baik
3	Terminal Jungke	Jungke	Kurang Baik
4	Terminal Matesih	Matesih	Tidak Baik (Bangunan Terminal Tidak Ada)

5	Terminal Karangpandan	Karangpandan	Kurang Baik
6	Terminal Ngargoyoso	Ngargoyoso	Kurang baik
7	Terminal Jambangan	Jambangan	Kurang Baik
8	Terminal Jenawi	Jenawi	Kurang Baik
9	Terminal Jumapolo	Jumapolo	Kurang baik
10	Terminal Jatipuro	Jatipuro	Kurang baik

Sumber : Dishub, 2020

Guna mendukung keselamatan lalu lintas, maka dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Karanganyar, yang terdiri antara lain rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), *guardrail*, dan marka jalan. Data Rambu-rambu Lalu Lintas yang tidak berfungsi dan kebutuhan rambu lalu-lintas Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019, selengkapnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.5
Data Rambu-rambu Lalulintas Kabupaten Karanganyar
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Berfungsi Baik (unit)	443	464	653	705	705
2	Tidak berfungsi (Rusak) unit	62	81	52	0	0
3	Kebutuhan (unit/ meter)	600	600	800	860	860
4	Persentase Ketersediaan Rambu	73,83	77,83	81,63	81,98	81,98

Sumber : Dishub, 2020

Data jumlah kendaraan bermotor yang diuji berdasarkan ketentuan wajib bayar dan beban biaya uji keadaan tahun 2015-2019 terdapat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.6
Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Diuji, Trayek dan Kecelakaan
Yang terjadi di Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kendaraan yang diuji (unit)	15.142	15.350	17.654	13.699	13.738
3	Jumlah kendaraan Wajib Uji (unit)	8.885	9.085	9.091	8.501	8.718
2	Jumlah Trayek (A-Q dan Perdesaan)	17	17	17	21	21
3	Jumlah kecelakaan lalulintas (kali)	907	1.287	1.181	847	1.467

Sumber : Dishub, 2020

Berikut data kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Karanganyar tahun 2015-2019 terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kecelakaan	699	1014	941	874	1.467
2	Jumlah Korban Meninggal	11	28	37	26	48
3	Jumlah Korban Luka Berat	42	70	60	57	39
4	Jumlah Luka Ringan	864	1.287	1.181	977	1.694

Sumber : Dishub, 2020



Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2014-2018					Realisasi Kinerja Tahun 2014-2018					Rasio antara Realisasi dan Target Tahun 2014-2018				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Prosentase (%) Penurunan Angka Kecelakaan pada Lalu Lintas	NA	NA	NA	8,00	9,00	NA	NA	NA	7,00	9,98	NA	NA	NA	87,50	110,89
Prosentase Rumah tidak Layak Huni (RTLH) yang ditangani	NA	NA	NA	90,00	100,00	NA	NA	NA	85,00	57,25	NA	NA	NA	94,44	57,25
Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	10,00	11,00	12,00	14,00	15,00	10,600	10,600	10,600	10,6	10,6	106,00	96,36	88,33	75,71	70,67

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Karanganyar Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Rasio antara Realisasi dan Target Tahun 2019
		2019	2019	2019
Prosentase (%) Penurunan Angka Kecelakaan pada Lalu Lintas	Rasio	0,70	1,40	2
Persentase rekomendasi ijin trayek (perdesaan/ perkotaan) yang dikeluarkan	%	72	66	0,91
Rasio rumah layak huni	Rasio	0.25	0.24	0,97
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	1,2	0.92	0,76
Persentase PSU perumahan yang telah bersertifikat	%	5	0	0

Tabel 2.10
Pencapaian Target dan Realisasi Anggaran
Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar

Uraian	Target Anggaran Tahun 2017-2019 (Rp.000)			Realisasi Anggaran Tahun 2017-2019 (Rp.000)			Rasio antara Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2019			Rata-rata Pertumbuhan		Ket.
	2017	2018	2019	2017	2108	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan	1.835.277	1.828.639	1.917.181	1.722.214	1.912.947	1.883.645	93,84	104,61	98,25	1,47	3,03	
Belanja Tidak Langsung	9.530.548	7.237.769	8.496.883	6.686.036	6.582.344	7.686.924	70,15	90,94	90,47	-3,75	4,76	
Belanja Langsung	19.599.492	10.316.323	9.313.060	4.718.679	9.707.832	8.757.036	24,08	94,10	94,03	-21,97	22,89	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	384.450	461.000	429.690	293.193	424.580	412.566	76,26	92,10	96,01	3,78	12,06	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	164.025	217.000	306.310,5	82.139	211.033	284.360	50,08	97,25	92,83	23,15	51,28	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	15.000	0	0	14.999	0	0,00	99,99	0,00	-100,00	-100,00	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	174.750	270.000	152049,5	153.375	256.006	151.450	87,77	94,82	99,61	-4,53	-0,42	
Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan	324.250	424.540	674.244	279.201	416.610	673.164	86,11	98,13	99,84	27,64	34,09	
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	289.100	328.000	386.525	219.525	324.801	383.571	75,93	99,02	99,24	10,16	20,44	
Program peningkatan pelayanan angkutan	355.510	478000	702.975	332.605	473.117	685.310	93,56	98,98	97,49	25,52	27,25	
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	3.136.550	170.000	468.116	786.694	168.997	465.091	25,08	99,41	99,35	-46,96	-16,07	
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	600.000	1.240.000	928.500	150.335	1.224.370	881.702	25,06	98,74	94,96	15,67	80,34	
Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas	280.000	545.000	453.000	199.250	507.867	437.855	71,16	93,19	96,66	17,39	30,01	

Uraian	Target Anggaran Tahun 2017-2019 (Rp.000)			Realisasi Anggaran Tahun 2017-2019 (Rp.000)			Rasio antara Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2019			Rata-rata Pertumbuhan		Ket.
	2017	2018	2019	2017	2108	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
Program Perumahan	0	65.000	464.875	0	58.621	435.904	0,00	90,19	93,77	92,67	95,18	
Program pengelolaan areal pemakaman	214.200	60.000	89.725	50.366	59.881	85.097	23,51	99,80	94,84	-25,18	19,10	
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	275.000	82.000	112.000	27.297	61.179	104.205	9,93	74,61	93,04	-25,88	56,29	
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	962.800	1.105.000	1.436.050	857.725	1.095.651	1.341.446	89,09	99,15	93,41	14,26	16,08	
Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman	12.686.357	4.705.783	2.659.000	1.291.971	4.296.373	2.399.723	10,18	91,30	90,25	-40,60	22,92	
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	0	150.000	50.000	0	113.742	45.593	0,00	75,83	91,19	-30,66	-26,27	

Sumber: Data Dinas Perhubungan Kab Karanganyar diolah, 2020

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dalam 5 (lima) tahun kedepan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tantangan

- a. Tuntutan dalam penyediaan transportasi yang murah, nyaman, tepat waktu dan dapat diakses oleh semua kalangan serta terkoneksi dengan jenis moda transportasi lainnya;
- b. Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan fenomena maraknya transportasi on-line;
- c. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat;
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berdisiplin lalu lintas sehingga menyebabkan angka kecelakaan yang cukup tinggi;
- e. Terbatasnya prasarana dan sarana keselamatan transportasi.

2. Peluang

- a. Tuntutan *transport demand*, membuka peluang untuk mengembangkan antarmoda/multimoda yang terintegrasi dan terkoneksi dengan melakukan pengembangan terminal bus perkotaan, perdesaan dan AKDP;
- b. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan anggaran bantuan keuangan Provinsi dan DAK untuk penyelenggaraan urusan perhubungan di daerah;
- c. Keberadaan pihak swasta yang berperan serta dalam penyediaan/ pemenuhan kebutuhan transportasi masal bagi masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
3. Belum optimalnya kualitas dokumen perancaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Permasalahan Bidang Perhubungan

- a. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, (tahun 2017 jumlah terminal tipe C sebanyak 10 unit);
- b. Terbatasnya ketersediaan halte dibandingkan kebutuhan;
- c. Belum optimalnya pengelolaan parkir;
- d. Belum terpenuhinya target kebutuhan terminal tipe C sesuai dengan RTRW Kabupaten Karanganyar, yaitu rencana pembangunan terminal tipe C meliputi Terminal Jatiyoso, Terminal Mojogedang dan Terminal Jumantono;

3. Permasalahan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pengujian yang ada, karena faktor usia peralatan pengujian;
- b. Kurangnya kesadaran wajib uji kendaraan yang tidak melakukan uji kendaraan;
- c. Kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalulintas;
- d. Kemacetan lalu lintas yang cukup tinggi pada saat libur panjang;
- e. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, tahun 2017 rambu-rambu lalulintas yang rusak/ tidak berfungsi sebanyak 52 unit, sedangkan kebutuhan sebanyak 229 unit;

- f. Masih cukup tingginya pelanggaran penggunaan angkutan barang dan angkutan umum (tahun 2017 angka pelanggaran/kecelakaan lalulintas sebesar 1.181 kasus;
- g. Banyaknya perlintasan rel kereta api yang tidak berpalang pintu, sebanyak 24 lokasi.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kinerja pelayanan dan pengelolaan perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanian	Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran dan SDM secara kualitas dan kuantitas, khususnya SDM perhubungan	Kapasitas SDM perhubungan yang mash kurang serta gedung kantor yang tidak sesuai standart. Mengingat gedung yang sekarang digunakan merupakan gedung lama.
		Turunnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum	• Belum optimalnya penyediaan transportasi massa yang murah, nyaman dan terkoneksi; • Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang kurang optimal;
		Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Karanganyar	• Rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalulintas; • Kurangnya penyediaan fasilitas perlengkapan perhubungan (sarana dan prasarana perhubungan)

Sumber: Hasil Anilisis, 2020

B. Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati/ Wakil Bupati Karanganyar

Visi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih periode tahun 2018-2023 dalam RPJMD adalah:

Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar

Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD Kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata "Berjuang" sebagai "berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu", berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (1) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (2) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (3) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata "Bersama" dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/ asosiasi/ forum/ lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep "Bersama" juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, di semua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, onitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 menjelaskan kata "Maju" sebagai masyarakat Karanganyar yang

menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

1. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
2. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus;
3. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat;
4. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman . Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan karanganyar atau karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju’ mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- a. **M** sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah karanganyar kondisi mantap;
- b. **A** sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- c. **J** sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- d. **U** sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan

yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus

diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera.

Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu: **Pembangunan Infrastruktur Yang Menyeluruh**. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Perhubungan adalah: ***Terwujudnya infrastruktur menyeluruh untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing, inklusif, tangguh dan berkelanjutan*** dengan sasaran:

a. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah;

Faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 sebagai berikut.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati Karanganyar dan Wakil Bupati Karanganyar

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh Tujuan : Terwujudnya infrastruktur menyeluruh untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing, inklusif, tangguh dan berkelanjutan. Sasaran : a. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah;	1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM; 2. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik bidang perhubungan; 3. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan; 4. Kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalu lintas;	1. Kebutuhan SDM 2. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi; 3. Belum optimalnya pelayanan angkutan darat;	1. Struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 2. Kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan; 3. Adanya upaya penyediaan pelayanan angkutan darat yang lebih baik; 4. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen ; 5. Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten 6. Peraturanperundangan-undangan yang jelas

C. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

1. Telaah Renstra Kementerian Perhubungan

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

- a. Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
- b. Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;
- c. Nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security dan sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Sesuai dengan Renstra Kementerian Perhubungan, sasaran yang akan dicapai oleh Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

a. Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi :

- 1) Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
- 2) Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

b. Pelayanan Transportasi

Aspek pelayanan transportasi, meliputi :

- 1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
- 2) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
- 4) Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance;
- 5) Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
- 6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
- 7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance*;

c. Kapasitas Transportasi

Aspek kapasitas transportasi, meliputi :

- 1) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
- 2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
- 3) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
- 4) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Dilihat dari sasaran Rencana Strategis Kementerian Perhubungan diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar memiliki beberapa faktor pengambat dalam pencapaian sasaran Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dinas Perhubungan
dalam Pencapaian Sasaran Kementerian Perhubungan

Sasaran Kementerian Perhubungan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas Perhubungan	Faktor Pendorong Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas Perhubungan
A. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi: 1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi; 2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;	Kurang Optimalnya Pelayanan Perhubungan	• Banyak rambu yang hilang/rusak • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas • Masih tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas jalan • Masih tingginya muatan lebih pada angkutan barang di Jalan. • Kurang disiplinnya awak kendaraan umum dan pengguna jalan	• Adanya upaya penyediaan pelayanan angkutan darat yang baik; • Terus dikembangkannya sarana, prasarana dan pendukung keselamatan keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi

Sasaran Kementerian Perhubungan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas Perhubungan	Faktor Pendorong Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas Perhubungan
B. Pelayanan Transportasi Aspek pelayanan transportasi, meliputi: 1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi; 2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan; 3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan; 4. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan <i>good governance</i>; 5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan; 6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi; 7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan <i>clean governance</i>;	1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM; 2. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan; 3. Terbatasnya sarana dan prasarana pengujian yang ada, karena faktor usi peralatan pengujian; 4. Kurangnya kesadaran wajib uji kendaraan yang tidak melakukan uji kendaraan;	• Kurangnya SDM bidang perhubungan secara kualitas dan kuantitas • Masih banyak pemilik Kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan uji • Adanya angkutan penumpang umum dan barang tidak laik jalan • Kurang disiplinnya para awak kendaraan umum dan masyarakat pengguna angkutan	• Ada upaya pemenuhan kebutuhan SDM dengan sistem kontrak; • Adanya sidak uji kelaikan angkutan barang/ orang; • Dukungan anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana yang layak.

Sasaran Kementerian Perhubungan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas Perhubungan	Faktor Pendorong Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas Perhubungan
C. Kapasitas Transportasi Aspek kapasitas transportasi, meliputi : 1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda; 2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang; 3. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia; 4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan; 5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.	1. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan; 2. Terbatasnya ketersediaan halte dibandingkan kebutuhan; 3. Kemacetan lalu lintas yang cukup tinggi pada saat libur panjang;	• Kurangnya angkutan umum yang layak sehingga mengakibatkan kurang diminatinya angkutan umum oleh masyarakat. • Belum optimalnya jaringan trayek	• Tingginya permintaan masyarakat terhadap angkutan umum masal yang murah dan nyaman; • Dukungan anggaran dan komitmen pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang layak

2. Telaah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mendukung capaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu:

"Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"

Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan misi sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, tolerandan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan RepublikIndonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yaang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/ Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian misi ke-2 yaitu ***Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota*** dengan program kerja ke-7 Pengembangan Transportasi Massal, Revitalisasi Jalur Kereta dan Bandara serta Pembangunan Embung/ Irigasi.

Tujuan, sasaran dan indikator Dinas Perhubungan dalam rangka mencapai visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan: Pemantapan system transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan indikator: Persentase pelayanan transportasi antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah.

Sasaran dari tujuan tersebut adalah:

- 1.1. Terjaminnya layanan jaringan distribusi transportasi orang dan atau barang, dengan indikator sasaran:

Persentase layanan jaringan distribusi transportasi orang dan atau barang.

- 1.2. Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi, dengan indikator sasaran: Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi;
- 1.3. Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan umum aglomerasi, dengan indikator sasaran: Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dari Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam fasilitasi Revitalisasi Kereta Api, Pengembangan Pelabuhan dan pengembangan Bandar Udara;
2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) yang terintegrasi dengan aglomerasi pengembangan Kawasan Strategis Wilayah;
3. Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang perhubungan;
4. Peningkatan PAD dengan konsep KPBU;
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung wilayah pengembangan kawasan strategis, KSPN dan KSP di Jawa Tengah;
6. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait sarana dan prasarana serta pelayanan di Bidang Perhubungan;
7. Peningkatan fasilitas keselamatan jalan, fasilitas keselamatan ASDP fasilitas penunjang keselamatan perlintasan KA, dan fasilitas keselamatan pelayaran;
8. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusan perhubungan dan keselamatan;
9. Mengembangkan Angkutan Masal yang berbasis *sustainable transport*;
10. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung berbasis IT;
11. Sosialisasi Keselamatan Kawasan Keselamatan operasional Penerbangan;

12. Pengendalian lalu lintas, Pengawasan angkutan jalan, Koordinasi Simpang dengan ATCS dan rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan di Jawa Tengah;
13. Melakukan kordinasi Forum antar lintas sector;
14. Penilaian WTN 35 Kabupaten/ kota serta Pembentukan kelompok masyarakat sadar keselamatan.

Berikut permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar berdasarkan sasaran strategis renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tupoksi dinas beserta faktor penghambat dan pendorong:



Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terjaminnya layanan jaringan distribusi transportasi orang dan atau barang	a. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, (tahun 2017 jumlah terminal tipe C sebanyak 10 unit); b. Belum terpenuhinya target kebutuhan terminal tipe C sesuai dengan RTRW Kabupaten Karanganyar, yaitu rencana pembangunan terminal tipe C meliputi Terminal Jatiyoso, Terimal Mojogedang dan Terminal Jumantono;	• Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dibandingkan kebutuhan yang ada untuk pemeliharaan/ revitalisasi terminal	• Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan transportasi yang nyaman dan aman bagi masyarakat; • Antusiasme masyarakat terhadap angkutan umum massal yang layak dan nyaman
2	Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi, dengan indikator sasaran: Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi;	a. Terbatasnya sarana dan prasarana pengujian yang ada, karena faktor usia peralatan pengujian; b. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, tahun 2017 rambu-rambu lalu lintas yang rusak/ tidak berfungsi sebanyak 52 unit, sedangkan kebutuhan sebanyak 229 unit; c. Banyaknya perlintasan rel kereta api yang tidak berpalang pintu, sebanyak 24 lokasi.	• Banyak rambu yang hilang/rusak • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta mengawasi dan memelihara rambu-rambu lalu lintas; • Kurangnya koordinasi dengan PT KAI terkait tanggungjawab terhadap perlintasan rel kereta api	• Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan transportasi yang nyaman dan aman bagi masyarakat; • Dorongan masyarakat agar dilakukan pemasangan palang pintu perlintasan rel kereta api; • Dukungan DPRD untuk berkoordinasi bersama dengan PT KAI terkait pengadaan perlintasan rel kereta api.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan umum aglomerasi, dengan indikator sasaran: Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal.	a. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, (tahun 2017 jumlah terminal tipe C sebanyak 10 unit); b. Terbatasnya ketersediaan halte dibandingkan kebutuhan; c. Belum terpenuhinya target kebutuhan terminal tipe C sesuai dengan RTRW Kabupaten Karanganyar, yaitu rencana pembangunan terminal tipe C meliputi Terminal Jatiyoso, Terminal Mojogedang dan Terminal Jumantono;	• Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dibandingkan kebutuhan yang ada untuk pemeliharaan/ revitalisasi terminal	• Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan transportasi yang nyaman dan aman bagi masyarakat; • Antusiasme masyarakat terhadap angkutan umum massal yang layak dan nyaman

Sumber: Hasil Analisis, 2020

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan urusan Perhubungan. RTRW Kabupaten Karanganyar 2011-2031 bertujuan mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan bermartabat sebagai daerah perbatasan Jawa Tengah di bagian Timur melalui pengembangan potensi kegiatan utama industri, pertanian, dan pariwisata, dengan mengedepankan keseimbangan pembangunan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut, maka peran Dinas Perhubungan lebih pada penyediaan infrastruktur wilayah yang mengarah pada penyelenggaraan urusan perhubungan yang berwawasan lingkungan. Lebih lanjut tujuan penataan ruang di Kabupaten Karanganyar dalam RTRW 2013-2032 diterjemahkan dalam 12 poin kebijakan penataan ruang wilayah sebagai berikut:

1. Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas;
2. Pembangunan prasarana utama untuk meningkatkan aksesibilitas, produksi, produktivitas, koleksi dan distribusi, serta mewujudkan keterpaduan antarwilayah di kabupaten dan antarwilayah kabupaten dengan wilayah lain;
3. Pemantapan kawasan lindung dilakukan melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan;
4. Pemantapan kawasan pertanian terpadu;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;
6. Pengembangan industri berbasis potensi lokal;

7. Pengurangan kesenjangan wilayah terutama wilayah bagian Selatan dan Timur dengan wilayah bagian Barat melalui optimalisasi konsep agropolitan berupa agroindustri, agrobisnis dan agrowisata sebagai penggerak pengembangan dan peningkatan nilai ekonomi kegiatan pertanian;
8. Pengembangan dan pemantapan sistem prasarana energi, telematika atau telekomunikasi, sumber daya air dan penyehatan lingkungan sebagai prioritas pengembangan guna mendukung pengembangan ekonomi wilayah;
9. Pengoptimalan kegiatan industri, pertanian dan pariwisata sebagai pendorong kegiatan ekonomi wilayah melalui penetapan kawasan-kawasan strategis yang mengakomodir kebutuhan ruang bagi ketiga kegiatan tersebut;
10. Pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan kegiatan wilayah baik dalam aspek fisik, sosial maupun ekonomi;
11. Pengembangan dan penciptaan lapangan kerja yang berkaitan dengan sektor basis wilayah (INTANPARI) melalui peningkatan kegiatan industri, industri pengolahan hasil pertanian dan industri pariwisata; dan;
12. Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar 2018-2023. Sebagaimana yang termuat pada RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2011-2033 adalah sebagai berikut:

1. Rencana struktur ruang wilayah, meliputi:
 - a. Rencana sistem perkotaan wilayah dan
 - b. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah, yang terdiri dari:
 - 1) Rencana sistem jaringan prasarana utama, berupa pengembangan sistem jaringan transportasi darat yang meliputi:
 - a) Rencana pengembangan terminal, meliputi:

- ❖ Pemantapan Terminal tipe B eksisting, meliputi Terminal Matesih dan Terminal Tawangmangu;
 - ❖ Rencana peningkatan tipe terminal dari Tipe C menjadi Tipe B, yaitu Terminal Karangpandan dan terminal Tuban Gondangrejo;
 - ❖ Rencana pembangunan terminal tipe B, yaitu Terminal Kebakkramat dan Terminal Induk Karanganyar di Papahan, Tasikmadu;
 - ❖ Pemantapan Terminal tipe C eksisting, meliputi Terminal Jungke, Terminal Jumapolo, Terminal Jatipuro, Terminal Jambangan, Terminal Jenawi dan Terminal Kemuning;
 - ❖ Rencana pembangunan terminal tipe C meliputi Terminal Jatiyoso, Terminal Mojogedang dan Terminal Jumantono
 - ❖ Rencana pembangunan terminal angkutan barang di Kecamatan Jaten.
- b) Rencana pengembangan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
- ❖ Tawangmangu-Magetan;
 - ❖ Sragen-Karanganyar-Wonogiri;
 - ❖ Surakarta-Klodran(Colomadu)-Tuban(Gondangrejo);
 - ❖ Tuban-Wonosari-Mojosongo-Surakarta;
 - ❖ Pelayanan trayek berbasis masal di kawasan Kabupaten Karanganyar.

c) Rencana pengembangan prasaarana kelengkapan jalan

2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya

2. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah

Arahana pemanfaatan ruang wilayah merupakan indikasi program utama penataan ruang yang meliputi:

a. Perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten, merupakan perwujudan sistem prasarana yang meliputi:

1) Transportasi

a) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas ruas-ruas jalan pada kawasan-kawasan strategis seperti Colomadu, Pertumbuhan Cepat Palur, Agropolitan dan Pariwisata;

- b) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas ruas-ruas jalan pada daerah terpencil Lereng Gunung Lawu;
- c) Pengembangan jaringan jalan tol;
- d) Pengembangan prasarana dan sarana transportasi melalui pemeliharaan, peningkatan kualitas dan pembangunan prasarana dan sarana transportasi;
- e) Pengembangan terminal melalui pemantapan terminal eksisting, peningkatan tipe terminal dari tipe C ke tipe B dan pembangunan terminal tipe B, tipe C, maupun terminal barang;
- f) Pengembangan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
- g) Peningkatan fungsi stasiun Palur dan Kaliyoso; dan
- h) Pembangunan prasarana penunjang jalan rel.



Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	RTRW Kab Karanganyar	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana struktur ruang wilayah	• Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, (tahun 2017 jumlah terminal tipe C sebanyak 10 unit); • Terbatasnya ketersediaan halte dibandingkan kebutuhan; • Belum terpenuhinya target kebutuhan terminal tipe C sesuai dengan RTRW Kabupaten Karanganyar, yaitu rencana pembangunan terminal tipe C meliputi Terminal Jatiyoso, Terimal Mojogedang dan Terminal Jumantono;	• Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dibandingkan kebutuhan yang ada untuk pemeliharaan/ revitalisasi terminal	• Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan transportasi yang nyaman dan aman bagi masyarakat; • Antusiasme masyarakat terhadap angkutan umum massal yang layak dan nyaman

E. Penentuan Isu-isu Strategis

Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagi kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan yang diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu tentang pertanggung jawaban instansi pemerintah yang didasarkan pada ukuran efisien, efektif dan ekonomis.

Berkaitan dengan peran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang perhubungan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman, Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyediaan transportasi massa yang murah, nyaman dan terkoneksi;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalulintas;
3. Kurangnya penyediaan fasilitas perlengkapan perhubungan (sarana dan prasarana)

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya maka visi dan misi tersebut harus dijabarkan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa penetapan tujuan dan sasaran dalam suatu organisasi. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5(lima) tahun. Dengan menetapkan tujuan ini maka Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1(satu) sampai 5(lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar selama tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tujuan : 1. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat;

Sasaran yang dicapai dari tujuan ini adalah:

- Sasaran : 1. Meningkatnya pelayanan transportasi darat;
2. Meningkatnya keselamatan berlalu lintas.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar mengalami perubahan pada tahun 2020. Perubahan tersebut sesuai dengan perubahan struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

Untuk lebih lengkapnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perhubungan
Kabupaten Karanganyar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
							2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan pelayanan transportasi darat		Persentase layanan angkutan darat	Jumlah angkutan darat dibagi jumlah penumpang angkutan darat di kali 100	%	6	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pelayanan transportasi darat yang aman dan nyaman bagi masyarakat	Persentase rekomendasi ijin trayek (perdesaan/ perkotaan) yang dikeluarkan	Jumlah ijin trayek yang direkomendasi dibagi jumlah ijin trayek keseluruhan dikali 100	%	71,43	72	75	77	78	80
		Meningkatnya keselamatan berlalu lintas	Penurunan angka kecelakaan	Jumlah angka kecelakaan sekarang dibagi jumlah kecelakaan tahun lalu	Rasio	0,73	0,70	0,69	0,68	0,66	0,65

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dan keselamatan transportasi darat melalui reformasi birokrasi, pengembangan fasilitas perhubungan, penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, penyediaan fasilitas alih moda yang memadai dan meremajakan armada angkutan umum;
2. Peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas;

B. Kebijakan

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan dan keselamatan transportasi darat dengan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan penyediaan fasilitas alih moda yang memadai;
2. Mengembangkan sistem manajemen rekayasa lalu lintas, penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan sosialisasi/ kampanye keselamatan lalu lintas kepada para pengemudi angkutan umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel. 5.1.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan pelayanan transportasi darat	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	Peningkatan pelayanan dan keselamatan transportasi darat melalui reformasi birokrasi, pengembangan fasilitas perhubungan, penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, penyediaan fasilitas alih moda yang memadai dan meremajakan armada angkutan umum.	Meningkatkan pelayanan dan keselamatan transportasi darat dengan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan penyediaan fasilitas alih moda yang memadai
2		Meningkatnya keselamatan berlalu lintas	Peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas.	Mengembangkan sistem manajemen rekayasa lalu lintas, penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan sosialisasi/ kampanye keselamatan lalu lintas kepada para pengemudi angkutan umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang (2018-2023) diuraikan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
6. Penyediaan alat tulis kantor;
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
9. Penyediaan peralatan rumah tangga;
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
11. Penyediaan makanan dan minuman;
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

B. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas operasional;
2. Pengadaan peralatan gedung kantor;
3. Pengadaan Mebeleur;
4. Pengadaan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat;
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
8. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur;
9. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi.

C. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Peningkatan SDM

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD;

2. Penyusunan produk hukum daerah (perda rumah susun;perda pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh; perda pengelolaan pemakaman dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat);
3. Penyusunan Renstra OPD.

E. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat;
2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan APILL;
3. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Penunjang Keselamatan Jalan
4. Pengaturan, Pengendalian dan Penataan Kegiatan Perparkiran;
5. Pengembangan Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Perhubungan
6. Pengadaan Mobil Operasional Bidang Perhubungan;
7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Pendukung Informasi Perhubungan;
8. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan High Mast;
9. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum dan High Mast;
10. Pengadaan Truck Crane (Mobil Tangga Listrik);
11. Pembayaran sewa dan kompensasi tanah yang dipergunakan oleh pemerintah daerah;
12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

F. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor;
2. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor;
3. Rehabilitasi/pemeliharaan APILL;
4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas CFD;
6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Perlintasan Kereta Api
7. Pengaturan, pengendalian dan penataan kegiatan perparkiran;
8. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana pendukung informasi perhubungan;

G. Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan

1. Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan;
2. Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas;
3. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi/ awak kendaraan angkutan teladan;
4. Penyelenggaraan posko angkutan lebaran;
5. Pelayanan angkutan mudik lebaran;

H. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas;
2. Pengadaan dan pemasangan fasilitas penunjang keselamatan jalan.

I. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor;
2. Pendukung operasional pengujian kendaraan bermotor;
3. Pengadaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor;
4. Peningkatan perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM PKB)

J. Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas

1. Kampanye Keselamatan Lalu Lintas;
2. Penjagaan perlintasan palang kereta api;
3. Operasi penertiban dan pemeriksaan kendaraan;
4. Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas/P3L;
5. Patroli dan pengawasan lalu lintas;
6. Penyelenggaraan Karanganyar *car free day*;
7. Pemilihan pelajar pelopor lalu lintas
8. Penyelenggaraan Forum LLAJ;
9. Pemantauan dan pengawasan analisis dampak lalu lintas;
10. Penyelenggaraan WTN;
11. Sosialisasi Ketertiban Berlalu Lintas;
12. Pengkajian dan Pengendalian Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas;
13. Penyusunan Tatralok Kabupaten Karanganyar;
14. Penyusunan Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
15. Penyusunan database kinerja lalulintas.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan perhubungan																	
	Survey Kepuasam Masyarakat					Nilai	77,2	78,20		79,20		80,20		81,20		82,20	
	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan																
	Nilai SAKIP					Nilai	65,50	65,60		65,70		65,73		65,74		65,75	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			%	100	100	426.690	100	475.000	100	579.500	100	687.000	100	682.000
	Penyediaan jasa surat menyurat		Terpenuhinya Pelayanan jasa surat menyurat			bulan	12	0	4.500	12	5.000	12	5.000	12	5.000	12	5.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik dan telephone			bulan	12	12	132.000	12	130.000	12	140.000	12	150.000	12	150.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Terpenuhinya kebutuhan pajak kendaraan dan service rutin kendaraan dinas/ operasional			bulan	12	12	25.400	12	20.000	12	35.000	12	51.000	12	51.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Terpenuhinya Penyediaan jasa kebersihan kantor			bulan	12	12	2.000	12	40.000	12	50.000	12	60.000	12	60.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/ service peralatan kerja			bulan	12	12	12.000	12	18.000	12	20.000	12	35.000	12	35.000
	Penyediaan alat tulis kantor		Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pendukung operasional kantor			bulan	12	76	20.000	85	25.000	90	35.000	100	45.000	100	45.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya barang cetakan, foto copy dan penjiilidan			bulan	12	12	15.400	12	10.000	12	20.000	12	30.000	12	30.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			bulan	12	12	3.000	12	10.000	12	10.000	12	10.000	12	10.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga		Terpenuhinya sarana dan prasarana kebersihan kantor			bulan	12	12	0	12	3.000	0	0	12	5.000	0	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan			bulan	12	12	4.340	12	4.000	12	4.500	12	6.000	12	6.000
	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan dan minum rapat			bulan	12	12	33.000	12	70.000	12	70.000	12	70.000	12	70.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah		Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah			bulan	12	12	175.050	12	140.000	12	190.000	12	220.000	12	220.000	

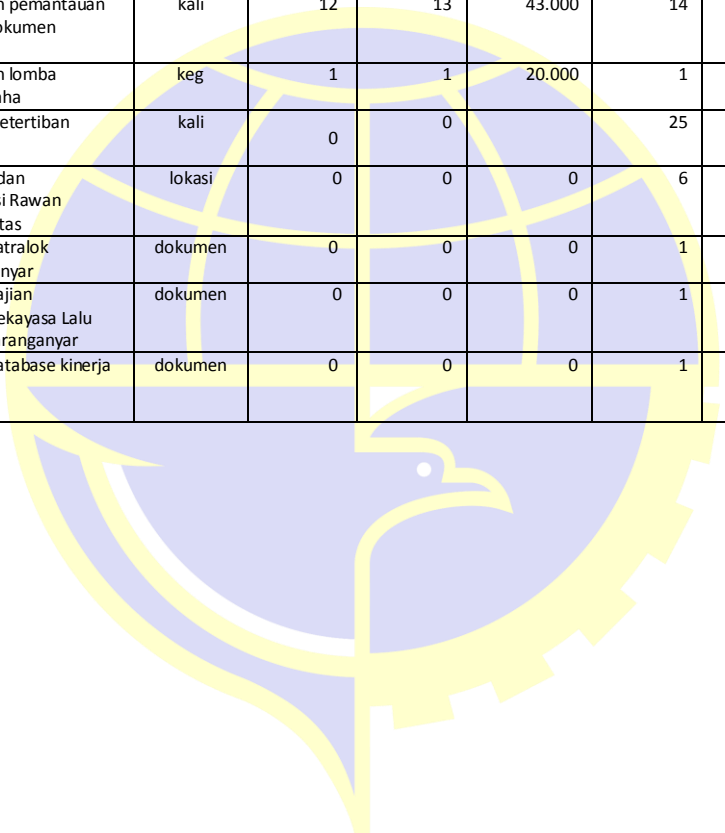
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	306.310	100	700.000	100	1.710.000	100	1.900.000	100	755.000
				Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan operasional	unit/mobil		0	0	0	150.000	2	1.100.000	2	1.300.000	0	150.000
						unit/motor		0	0	5	-	0		3		5	
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan kantor yang memadai	printer		2	95.310	2	70.000		75.000	2	80.000	3	80.000
						AC		3		2		2		3		3	
						Mobile file		1		1		1		1		1	
						Handy talky		2		0		0		0		2	
						laptop		0		2		3		2		2	
						PC dekstop		0		2		2		5		3	
				Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	buah		0	0	20	100.000	20	100.000	20	100.000	20	100.000
				Pengadaan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pengadaan Aplikasi	aplikasi		0	0	0	0	1	50.000	0	0	0	0
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit		0	0	2	120.000	2	120.000	2	120.000	2	120.000
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas (BBM, ganti oli, dll)	bulan		12	156.000	12	150.000	12	150.000	12	160.000	12	160.000
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terwujudnya ruang kerja kantor yang memadai dan nyaman	bulan		0	0	12	25.000	12	25.000	12	30.000	12	30.000
				Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpenuhinya perawatan dan pemeliharaan mebeluer	buah		0	0	0	0	12	5.000	12	5.000	12	5.000
				Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi	Jumlah peralatan komunikasi yang terpelihara	unit		5	55.000	7	85.000	7	85.000	8	105.000	10	110.000
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		0	0	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000
				Peningkatan SDM	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/ pelatihan/ bimtek	orang		0	0	12	100.000,00	12	100.000,00	12	100.000	12	100.000
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	152.049	100	270.000	100	270.000	100	270.000	100	270.000
				Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan PD	dokumen	4	4	92.049	4	120.000	4	120.000	4	120.000	4	120.000
				Penyusunan Renstra OPD	Jumlah dokumen Renstra OPD	dokumen	0	1	60.000								
				Penyusunan produk hukum daerah	Tersedianya produk hukum perhubungan	Perbup/ perda	0	1	0	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
Meningkatkan pelayanan transportasi darat																	
	Persentase layanan angkutan darat					%	6	6		7		8		9		10	
	Meningkatnya pelayanan transportasi darat yang aman dan nyaman bagi masyarakat																
	Persentase rekomendasi ijin trayek (perdesaan/ perkotaan) yang dikeluarkan					%	71,43	72		75		77		78		80	
	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas																
	Penurunan angka kecelakaan					Rasio	0,73	0,70		0,69		0,68		0,66		0,65	
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Terminal Tipe C yang sesuai dengan Standar	%	10	10	674.244	20	6.792.440	30	6.209.330	40	7.232.392	50	8.444.272			
		Persentase pemasangan rambu-rambu	%	55	65		71		77		83		89				
		Persentase capaian PAD dari parkir (tepi jalan kabupaten)	%	125	134		141		148		156		163				
	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Jumlah bulan terpenuhinya peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	bulan	6	12	674.244	12	821.070	12	985.280	12	1.182.340	12	1.418.810			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan APILL	Terpenuhinya pemeliharaan APILL di Kabupaten Karanganyar	bulan	12	0	0	12	291.740	12	362.090	12	399.500	12	458.810			
	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Penunjang Keselamatan Jalan	Jumlah CCTV di setiap simpang APILL dan lokasi tertentu	unit	5	0	0	2	200.000	3	300.000	4	400.000	5	500.000			
	Pengaturan, Pengendalian dan Penataan Kegiatan Perparkiran	Terpenuhinya administrasi retribusi parkir tertata dengan baik	bulan	12	0	0	12	85.000	12	95.000	12	105.000	12	115.000			
	Pengembangan Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah aplikasi GIS	aplikasi	0	0	0	1	30.830	1	41.000	1	53.600	1	60.710			
	Pengadaan Mobil Operasional Bidang Perhubungan	Tersedianya kendaraan operasional APILL/ Rambu dan petugas pengelola parkir	unit	0	0	0	1	550.000	1	550.000	1	550.000	1	550.000			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Pendukung Informasi Perhubungan	Terpenuhinya pemeliharaan sarana pendukung informasi perhubungan di Kabupaten Karanganyar	bulan	12	0	0	12	10.000	12	17.000	12	17.000	12	17.000			
Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan High Mast	Terpeliharanya kondisi penerangan jalan umum di Kabupaten Karanganyar	bulan	12	0	0	12	520.800	12	625.000	12	750.000	12	825.000				
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum dan High Mast	Tersedianya lampu PJU dan High Mast yang digunakan untuk menambah keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar	paket	1	0	0	1	2.250.000	1	2.699.960	1	3.239.952	1	3.962.942				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
				Pengadaan Truck Crane (Mobil Tangga Listrik)	Jumlah pengadaan kendaraan operasional	unit	0	0	0	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0
				Pembayaran sewa dan kompensasi tanah yang dipergunakan oleh pemerintah daerah	Terbayarnya sewa dan kompensasi tanah oleh pemkab	lokasi		0	0	1	33.000	1	34.000	1	35.000	1	36.000
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	paket	1	0	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
				Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	50	50	386.525	52	375.000	53	390.000	55	410.000	60	440.000
				Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah peralatan yang terpenuhi kalibrasi dan pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	unit	9	9	158.500	9	160.000	9	170.000	9	180.000	9	190.000
				Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Terpenuhinya pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	bulan	12	0	0	12	45.000	12	50.000	12	60.000	12	80.000
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah fasilitas pendukung keselamatan jalan yang terpelihara dengan baik	unit	0	0	0	15	60.000	15	60.000	15	60.000	15	60.000
				Rehabilitasi, Pemeliharaan Fasilitas CFD	Jumlah Pemeliharaan Fasilitas CFD	set	0	0	0	1	60.000	1	60.000	1	60.000	1	60.000
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Perlintasan Kereta Api	Jumlah Pemeliharaan Fasilitas Perlintasan Kereta Api	unit	0	0	0	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000
				Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL	Terpenuhinya pemeliharaan APILL di Kabupaten Karanganyar	bulan	12	12	134.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Pengaturan, Pengendalian dan Penataan Kegiatan Perparkiran	Terpenuhinya administrasi retribusi parkir tertata dengan baik	bulan	12	12	77.025	0	0	0	0	0	0	0	0
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Pendukung Informasi Perhubungan	Terpenuhinya pemeliharaan sarana pendukung informasi perhubungan di Kabupaten Karanganyar	bulan	12	12	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah orang melalui terminal per tahun	orang	2.050.000	2.060.000	702.975	2.080.000	843.570	2.100.000	1.012.280	2.120.000	1.214.740	2.150.000	1.457.690
				Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Jumlah bulan terpenuhinya administrasi ijin bidang perhubungan	bulan	12	12	252.143	12	260.000	12	290.000	12	350.000	12	420.000
				Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah terselenggaranya sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Kali	0	0	0	0	0	5	50.000	5	50.000	6	87.690
				Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah terselenggaranya Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Kali	0	0	0	0	0	1	12.280	1	84.740	1	100.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
				Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran	Jumlah posko angkutan lebaran guna membantu memperlancar mudik lebaran tiap tahunnya	posko	0	0	0	2	35.000	2	50.000	2	60.000	2	100.000
				Pelayanan Angkutan Mudik Lebaran	Jumlah bis yang digunakan pelayanan angkutan mudik lebaran	Unit	31	32	450.832	35	548.570	43	610.000	49	670.000	55	750.000
				Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Pemasangan rambu-rambu	%	N/A	65	468.116								
				Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	Jumlah pengadaan dan pemasangan traffic light	paket	0	1	99.045								
				Pengadaan dan Pengecatan Zona Selamat Sekolah	Jumlah pengadaan	paket	0	1	75.000								
				Pengadaan Traffic Barrier	Jumlah pengadaan traffic barrier	paket	0	1	100.000								
				Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Penunjang Keselamatan Jalan	Jumlah CCTV di setiap simpang APILL	unit	5	2	194.071								
				Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	40	59	928.500	62	800.000	64	836.000	67	841.000	70	1.046.000
				Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah pengadaan alat pengujian	unit	0	0	0	1	200.000	1	180.000	1	180.000	1	280.000
				Pendukung Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah bulan terpenuhinya operasional pengujian kendaraan bermotor	bulan	12	12	658.000	12	320.000	12	320.000	12	320.000	12	320.000
				Pengadaan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kelengkapan administrasi pengujian kendaraan bermotor	bulan	12	12	88.000	12	80.000	12	96.000	12	81.000	12	171.000
				Peningkatan Perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM PKB)	Jumlah Aplikasi SIM PKB yang ditingkatkan	aplikasi	1	1	182.500	2	200.000	2	240.000	2	260.000	2	275.000
				Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas	Persentase kendaraan pribadi yang memenuhi ambang batas emisi gas buang	%	N/A	1	453.000	1	995.000	2	871.000	2	886.000	3	901.000
				Kampanye Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah kegiatan pelaksanaan kampanye keselamatan lalu lintas	kegiatan		0	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
				Penjagaan Perlintasan Palang Kereta Api	Terpenuhinya penjagaan perlintasan palang kereta api	bulan	12	12	127.000	12	140.000	12	140.000	12	140.000	12	140.000
				Operasi Penertiban dan Pemeriksaan Kendaraan	Jumlah Pelaksanaan operasi gabungan dengan Polres	kali	12	12	30.500	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000
				Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas/P3L	Jumlah pelaksanaan pengamanan lalu lintas pada ruas jalan Kabupaten Karanganyar	kali	120	120	50.000	150	80.000	150	80.000	150	80.000	150	80.000
				Patroli dan Pengawasan Lalu Lintas	Jumlah pelaksanaan patroli pengawasan lalu lintas	kali	0	0	0	50	30.000	50	36.000	50	36.000	50	36.000
				Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan karanganyar car free day selama 4 jam	kali	47	47	152.000	47	200.000	47	200.000	47	200.000	47	200.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
				Pemilihan pelajar pelopor lalu lintas	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan	kegiatan	0	0	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
				Penyelenggaraan Forum LLAJ	Jumlah pelaksanaan pelaksanaan rapat koordinasi pemecahan permasalahan LLAJ	bulan	9	9	30.500	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000
				Pemantauan dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas	Jumlah pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dokumen andalalin	kali	12	13	43.000	14	40.000	14	40.000	14	40.000	14	40.000
				Penyelenggaraan WTN	Jumlah pelaksanaan lomba Wahana Tata Nugraha	keg	1	1	20.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000
				Sosialisasi Ketertiban Berlalu Lintas	Jumlah Sosialisasi Ketertiban Berlalu Lintas	kali	0	0		25	25.000	25	30.000	25	30.000	25	30.000
				Pengkajian dan Pengendalian Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas	Jumlah Pengkajian dan Pengendalian Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas	lokasi	0	0	0	6	60.000	6	60.000	6	60.000	6	60.000
				Penyusunan Tatralok Kabupaten Karanganyar	Jumlah dokumen Tatralok Kabupaten Karanganyar	dokumen	0	0	0	1	150.000	0	0	0	0	0	0
				Penyusunan Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah dokumen Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu LintasKabupaten Karanganyar	dokumen	0	0	0	1	40.000	1	50.000	1	60.000	1	70.000
				Penyusunan Database Kinerja Lalu Lintas	Jumlah dokumen database kinerja lalu lintas	dokumen	0	0	0	1	35.000	1	40.000	1	45.000	1	50.000



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
Persentase layanan angkutan darat	Jumlah angkutan darat dibagi jumlah penumpang angkutan darat di kali 100	%	6	6	7	8	9	10
Persentase rekomendasi ijin trayek (perdesaan/ perkotaan) yang dikeluarkan	Jumlah ijin trayek yang direkomendasi dibagi jumlah ijin trayek keseluruhan dikali 100	%	71,43	72	75	77	78	80
Penurunan angka kecelakaan	Jumlah angka kecelakaan sekarang dibagi jumlah kecelakaan tahun lalu	rasio	0,73	0,70	0,69	0,68	0,66	0,65
Persentase terminal type C sesuai standart	Jumlah terminal C sesuai standart di bagi jumlah terminal C keseluruhan di kali 100	%	10	10	20	30	40	50
Persentase pemasangan rambu-rambu	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n dibagi jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikali 100	%	NA	65	71	77	83	89
Persentase capaian PAD dari parkir (tepi jalan kabupaten)	Jumlah capaian PAD parkir tepi jalan dibagi Target PAD parkir tepi jalan dikali 100	%	125	134	141	148	156	163
Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	Jumlah prasarana dan sarana LLAJ dalam kondisi baik dibagi Jumlah prasarana dan sarana fasilitas LLAJ	%	50	50	52	53	55	60
Jumlah orang melalui terminal per tahun	Jumlah orang melalui terminal per tahun	Orang/ tahun	2.050.000	2.060.000	2.080.000	2.100.000	2.120.000	2.150.000
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n dibagi jumlah angkutan umum pada Tahun n dikali 100	%	40	59	62	64	67	70
Persentase kendaraan pribadi yang memenuhi ambang batas emisi gas buang	Jumlah kendaraan pribadi yang memenuhi ambang batas emisi gas buang dibagi jumlah kendaraan pribadi yang melakukan tes emisi gas buang dikali 100	%	NA	1	1	2	2	3

Sumber: RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

BAB VII PENUTUP

A. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025.

B. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar wajib berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas

Perhubungan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Karanganyar,



SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 196902151990011002

